

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KOMITMEN
PIMPINAN TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN
DAERAH PADA SKPD DI KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**NUR ALFI RAHMI
NPM : 1802110008**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 8 Oktober 2020

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NUR ALFI RAHMI
NPM : 1802110008

Dengan judul:

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP
TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DI
KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi


Nuzli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Eva Susanti, SE, M.Si, Ak
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II


Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 8 Oktober 2020

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NUR ALFI RAHMI
NPM : 1802110008

Dengan judul:

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP
TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DI
KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 15 September 2020

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar”**. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahnda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna terciptanya cita-cita.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Nadiya, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Bapak Rusnaldi, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Syamsidar, SE, M.Si,Ak selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si,Ak.CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ibu Eva Susanti, SE, M.Si,Ak,CA selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Ibu Elviza, SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
9. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Teman- teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Banda Aceh, Juli 2020

Nur Alfi Rahmi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	8
2.1.1.1 Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	8
2.1.1.2 Karakteristik Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.1.1.3 Indikator Transparansi Keuangan Daerah.....	12
2.1.2 Laporan Keuangan Daerah	12
2.1.2.1 Pengertian Penyajian Laporan Keuangan Daerah....	12
2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah	13
2.1.2.3 Manfaat Laporan Keuangan Daerah	15
2.1.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan	16
2.1.2.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
2.1.2.6 Indikator Penyajian Laporan Keuangan Daerah	20
2.1.3. Aksesibilitas Laporan Keuangan	21
2.1.3.1 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan	21
2.1.3.2 Sistem Informasi Keuangan Daerah	22

2.1.3.3 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	23
2.1.4 Komitmen Pimpinan	24
2.1.4.1 Pengertian Komitmen Pimpinan	24
2.1.4.2 Indikator Komitmen Pimpinan	26
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	31
2.4 Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.1.1 Lokasi Dan Objek Penelitian	33
3.1.2 Jenis Penelitian.....	33
3.1.3 Horizon Waktu.....	33
3.1.4 Unit Analisis	34
3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian	34
3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Definisi Dan Operasional Variabel	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
3.6 Pengujian Data	39
3.6.1 Uji Validitas	39
3.6.2 Uji Realibilitas	40
3.7 Pengujian Hipotesi	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar	43
4.2 Deskriptif Variabel Penelitian.....	44
4.2.1 Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah	44
4.2.2 Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	45
4.2.3 Variabel Komitmen Pimpinan.....	47
4.2.4 Variabel Transparansi Keuangan Daerah.....	48
4.3 Hasil Pengujian Data.....	49
4.3.1 Pengujian Instrumen.....	49
4.3.2 Pengujian Hipotesis.....	52
4.3.3 Koefisien Determinasi.....	53
4.4 Pembahasan.....	54
4.4.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah,	

Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah	54
4.4.2 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Keuangan Daerah.....	55
4.4.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah.....	55
4.4.4 Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1	Populasi Dan Sampel Penelitian	35
Tabel 3.2	Skala Likert	37
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 4.1	Indikator Penyajian Laporan Keuangan Daerah	44
Tabel 4.2	Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	45
Tabel 4.3	Indikator Komitmen Pimpinan.....	47
Tabel 4.4	Indikator Transparansi Keuangan Daerah.....	48
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 4.6	Hasil Uji Realibilitas.....	51
Tabel 4.7	Pengujian Hipotesis (Coefficients)	52
Tabel 4.8	Kofesien Determinasi (Model Summary)	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	32
------------	-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesiner Penelitian.....	63
Lampiran 2	Hasil Out-Put SPSS	67

**Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan
Keuangan Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah
Pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar**

**Nur Alfi Rahmi
NPM : 1802110008**

**Pembimbing : 1. Eva Susanti, SE,M.Si,Ak
2. Elviza, SE,M.Si**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar. penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode sensus. Objek dalam penelitian ini yaitu penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan terhadap transparansi laporan keuangan daerah (pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar). sampel penelitian ini berjumlah 90 responden. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda dan diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (*statistical product and service solutions*) versi 20,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

Kata kunci : Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, komitmen pimpinan dan transparansi keuangan daerah

The Effect of the Presentation of Regional Financial Report, the Accessibility of Financial Report, and the Leadership Commitment on Regional Financial Transparency in Local Government Working Unit in Aceh Besar District

Nur Alfi Rahmi
NPM : 1802110008

Supervisor : 1. Eva Susanti, SE,M.Si,Ak.CA
2. Elviza, SE,M.Si

ABSTRACT

This study aimed to determine the presentation of regional financial report, the accessibility of financial report, and the leadership commitment affected regional financial transparency in local Government Working Unit in Aceh Besar District. This research which used census method. The objects of this study were the presentation of regional financial report, the accessibility of financial report, and the leadership commitment on regional financial transparency (in Local Government Working Unit in Aceh Besar District).The data were collected through a questionnaire from 90 respondents and were analysed using multiple linear regression models and then processed using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 20.0. The results showed that the presentation of regional financial report, the accessibility of financial report, and the leadership commitment affected regional financial transparency both partially or simultaneously.

Keywords : The presentation of regional financial report, the accessibility of financial report, the leadership commitment, and the regional financial transparency.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini membuat tuntutan masyarakat atas pertanggung jawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik meningkat. Hal ini, seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (*akuntability*) dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerjanya. Mardiasmo (2010) menjelaskan pengertian akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan melaporkan pertanggung jawaban serta mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP No. 58 Tahun 2005). Penyajian laporan keuangan daerah yang komprehensif adalah salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik (Superdi, 2017:2016). Pemerintah daerah harus mampu memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan kepada masyarakat.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Fauziyah, 2017). Saat

ini, pelaporan pertanggungjawaban pemerintah terkait keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan dan kinerja kepada masyarakat baik langsung atau diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat diketahui melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website (internet) pemerintah. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Sanjaya dkk, 2014).

Komitmen pimpinan dalam organisasi atau pemerintahan menentukan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bidang organisasi, oleh karena itu komitmen akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerjaan terhadap organisasi. Adanya komitmen, organisasi dapat berkembang searah dan seiring sejalan dalam usaha mewujudkan program organisasi, dengan kata lain komitmen pimpinan dapat mempengaruhi motivasi individu untuk menentukan suatu hal.

Lembaga- lembaga publik baik di pusat maupun di daerah mendapat tuntutan akuntabilitas, sehingga seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strateginya, melakukan pengukuran kinerja serta melaporkan dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas. Hal tersebut sangat perlu dilakukan sehingga dapat memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik.

Dengan adanya reformasi dibidang pengelolaan keuangan yang mengarahkan untuk mengimplementasikan *good governace* maka pemerintah daerah tidak dapat lagi menutup-nutupi keuangannya dari publik. Sejalan dengan

pelaksanaan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kita semua menginginkan terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam *good governance* menghendaki pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), partisipasi, keadilan dan kemandirian.

Salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya transparansi ini bisa dilakukan melalui pelaksanaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi laporan keuangan juga harus dipublikasikan agar masyarakat selaku *stakeholders* mengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja (Mahmudi, 2010).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi maka keuangan daerah tersebut bisa jadi sebuah manipulasi atau kebohongan dan bahkan hanya karangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan masyarakat tidak dapat mendapatka informasi yang semestinya.

Cara yang ditempuh untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi

keuangan daerah. Agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik, sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih bertanggung jawab, jujur dan adil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar laporan keuangan daerah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah kabupaten Aceh Besar tanggal 31 desember 2017 dan 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 seperti, masih kurangnya pemahaman pelaku keuangan terhadap pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar, masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi sehingga sistem informasi pengelolaan

keuangan tidak dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat, masih kurangnya komitmen para kepala SKPD terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu:
“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas keuangan daerah dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.
2. Apakah penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Aceh Besar.
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Aceh Besar.
4. Apakah komitmen pimpinan secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah secara simultan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk menganalisis apakah secara parsial penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk menganalisis apakah secara parsial aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Aceh Besar.
4. Untuk menganalisis apakah secara parsial komitmen pimpinan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah SKPD pada Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan terhadap transparansi keuangan daerah sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah :

1. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan dan menambah pengetahuan dalam menganalisa tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan terhadap transparansi laporan keuangan.
2. Bagi SKPD kabupaten Aceh Besar sebagai pengguna utama laporan keuangan agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan dan mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya terutama bagi para pengguna eksternal, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan serta semua sumber daya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh antar variabel independen, yaitu penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan komitmen pimpinan terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Aceh Besar. lokasi ini dipilih sebagai lokasi dalam penelitian ini karena daerah yang mudah dijangkau dan sesuai dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Djalil (2014) menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna “Memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Mahsun (2016) transparansi merupakan kondisi adanya keterbukaan secara penuh, juga merupakan salah satu elemen penopang akuntabilitas. Nordiawan (2010) menyatakan transparansi artinya kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan

peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo (2006) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah sebuah konsep yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi (*supply side of transparency*), dapat diakses, dan digunakan oleh masyarakat dan dapat pemangku kepentingan lainnya (*demand side of transparency*) (De Araujo dan Tejedo, 2016).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Transparansi adalah prasyarat dan penjamin tata pemerintahan yang baik, ini mengasumsikan bahwa aksesibilitas informasi publik yang baik dan komunikasi yang lebih efektif. Transparansi ditampilkan sebagai penjamin utama efektivitas tindakan publik, lingkungan yang transparansi memberikan kepercayaan dan keandalan, sehingga meningkatkan kepercayaan pada badan publik. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Transparansi berarti terbuka akses bagi semua yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberika aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi dapat pula membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terkait semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah meningkatkan transparansi dengan mengungkapkan lebih banyak informasi anggaran dan keuangan kepada warga negara, sehingga memberikan pengawasan pengeluaran publik dan mencegah korupsi dan pemborosan sumber daya publik (Nadham, 2016). Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2014) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu informatif (*informative*), keterbukaan (*opennes*), pengungkapan (*disclosure*). Dari beberapa argumentasi yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintah daerah merupakan suatu hal yang penting dan perlu dilaksanakan agar tercapainya sistem pemerintahan yang baik.

2.1.1.2 Karakteristik Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut adalah penjelasan dari transparansi pengelolaan keuangan daerah :

1. Informatif (*informative*)
 Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
 - a. Tepat waktu
 Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai
 Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai hal-hal material.
 - c. Jelas
 Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat
 Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
 - e. Dapat diperbandingkan
 Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
 - f. Mudah diakses
 Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. Keterbukaan (*openness*)
 Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
3. Pengungkapan
 Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktifitas dan kinerja finansial.
 - a. Kondisi keuangan
 Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
 - b. Susunan pengurus
 Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.
 - c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan
 Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.1.3 Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun indikator transparansi menurut Institute For Democracy In South Africa (IDASA) dalam Djalil (2014) yaitu :

1. Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi yang terbuka
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran berupa
3. Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksaan yang independen dan efektif serta di dukung oleh lembaga statistik yang memiliki data akurat dan berkualitas
4. Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran
5. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran

1.1.2 Laporan Keuangan Daerah

1.1.2.1 Pengertian Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Menurut Nordiawan (2008), laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan elemen dari transparansi dan akuntabilitas.

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah no 8 tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Dalam pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkapkan secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

1.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Siti dan Aida). Sedangkan menurut Halim (2009) menyatakan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan laporan tentang :

1. Posisi Keuangan
Posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban dan modal perusahaan pada tanggal tertentu (contohnya akhir bulan, akhir semester atau akhir tahun). Neraca disebut juga laporan posisi keuangan, merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan perusahaan karena neraca merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban dan ekuitas.
2. Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

3. Arus kas
Arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
4. Kinerja Pelaporan Keuangan
Kinerja pelaporan keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi dan surplus atau defisit.

Sanjaya dkk (2014) mengemukakan tujuan umum laporan keuangan antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dan pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Superdi, 2019). Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto (2015) tujuan laporan keuangan digunakan sebagai :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.1.2.3 Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas laporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dimasa mendatang. Informasi keuangan didalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah atau kepala pmda) ketika mereka menjadi bertanggungjawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan hutang yang mereka kelola.
- b. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang., pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- d. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Dengan adanya laporan keuangan yang disediakan manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan atau instansi dimasa yang akan datang.

1.1.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Fauziyah (2017) mengemukakan empat karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa di masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi atau ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang terdapat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dalam jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di uji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
 4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksikan masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dan informasi disajikan tepat waktu dan lengkap. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain.dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna

dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

1.1.2.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten (Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto, 2015). Berikut komponen laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah daerah secara tersanding. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA, adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja, adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan dioeroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer, adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*), adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggara bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi suatu keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan operasional menyajikan inkhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Adapun unsur yang di cakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapat-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer, adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa, adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang ukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari peneimaan dan pengeluaran kas, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Kas, adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah.

- b. Pengeluaran kas, adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah.
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan, menyajikan dan menyediakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengungkapkan informasi secara umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
 - b. Menyajikan informasi tentang kebijakan *fiscal*/keuangan dan ekonomi makro.
 - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang di pilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
 - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan.
 - f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
 - g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.1.2.6 Indikator Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan (2008), indikator penyajian laporan keuangan meliputi :

- 1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dengan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

1.1.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Fauziyah, 2017). Sedangkan menurut Mustofa (2012) aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik (Hahenussa, 2015). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 9 ayat 4 tahun 2008 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap badan publik untuk menyebarluaskan badan publik secara berkala, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan terkait kemudahan seseorang untuk mengakses informasi laporan keuangan. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, sehingga perlu diselenggarakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD).

2.1.3.2 Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, terdapat penjelasan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa setiap daerah diwajibkan membuka akses kepada stakeholder atau kepada masyarakat secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya (Fauziyah, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Hahenusssa (2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui dan memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Dalam aksesibilitas ini terdapat beberapa indikator untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, kemudahan dan *accessible* (Sumiyati, 2015).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aksesibilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggung jawaban maupun penggunaan informasi yang dapat dibaca dan dipahami (Sanjaya dkk, 2014). Saat ini, era demokrasi terbuka akses yang diberikan melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004 dalam Wahyuni, 2014).

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya (Hahenus, 2015). Aksesibilitas laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak berkepentingan dan masyarakat untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik bagi orang-orang yang berkepentingan.

Dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan secara terbuka dan dapat kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Selain itu, aksesibilitas laporan keuangan akan dapat mengatasi masalah *information asymmetry* antara masyarakat atau *principal* yang memberikan amanah kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan padanya. Dimana pemerintah melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Sehingga melalui aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas publik dapat ditingkatkan (Ni Made Suratni, Nyoman Trisna Heriawati, Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014).

2.1.3.3 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Fauziah (2017) menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan

akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan dengan memenuhi hal berikut:

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah harus dipublikasikan secara terbuka bagi pengguna laporan keuangan.
2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. *Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

1.1.4 Komitmen Pimpinan

1.1.4.1 Pengertian Komitmen Pimpinan

Komitmen adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu. Hal ini pimpinan tidak bekerja sendiri tetapi harus bekerja sama dengan orang lain atau bawahannya. Kerja sama harus ditunjukkan melalui keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dengan mengarahkan, mempengaruhi, mendorong bawahannya kearah berbagai tujuan dalam organisasi termasuk program pengendalian kualitas. Mowday *et.al.*, (1979) mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi khusus, meliputi kepercayaan, dukungan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dan keinginan yang kuat untuk menggunakan upaya yang sungguh-sungguh untuk kepentingan organisasi, dan kemauan yang kuat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi.

Sedangkan komitmen pimpinan adalah mempertahankan keikutsertaan pimpinan puncak dalam organisasi yang ditunjukkan melalui kemauan untuk memainkan upaya tertentu atas nama profesi dan upaya manajemen perusahaan

dalam melaksanakan tugas pokoknya. Komitmen pimpinan memiliki pengaruh paling besar terhadap penerapan suatu kebijakan atau peraturan dalam organisasi. Komitmen pimpinan merupakan aspek penting dalam keberlangsungan sistem manajemen suatu organisasi, komitmen pimpinan dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi dimasa yang akan datang (Noviandini dkk, 2015).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati, Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51 ayat (2), kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan asset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja.laporan keuangan merupakan media bagi media untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Untuk itu pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Penyelenggaraan pemerintah negara yang memiliki kriteria *good governance*, diperlukan adanya komitmen pimpinan. Komitmen memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Kontribusi yang berarti dalam hal pengelolaan keuangan negara adalah menghasilkan laporan keuangan yang transparan untuk menyajikan dan mengungkapkan semua transaksi keuangan dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah dengan harapan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

1.1.4.2 Indikator Komitmen Pimpinan

Maxwell dalam Kartini (2015) menyatakan bahwa komitmen memiliki tiga sifat, yaitu :

1. Komitmen dimulai dalam hati
Seseorang yang ingin membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, orang tersebut terlebih dahulu memeriksa hatinya apakah sudah benar-benar berkomitmen.
2. Komitmen diuji dengan perbuatan
Perbuatan merupakan satu-satunya ukuran sejati dari komitmen, sehingga komitmen harus diiringi oleh perbuatan.
3. Komitmen membuka pintu menuju prestasi
Komitmen berlawanan dengan penolakan, karena komitmen adalah janji serius untuk terus maju dan untuk bangkit. Seseorang yang ingin mencapai suatu tujuan maka harus mempunyai komitmen.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peggy Sande (2013) Yang Berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan

berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Siti Aliyah Dan Aida Nahar (2014) Yang Berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Jepara)”. Hasil penelitian menunjukka bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Putu Sri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati (2014) Yang Berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Bandung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Salomi J. Hahenussa (2015) Yang Berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan

Kota Ambon)”. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Embun Widya Sari (2017) Yang Berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Gunung Hasian Siahaan (2018) Yang Berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Di Kabupaten Keerom”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sande (2013)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penelitian terdahulu menggunakan provinsi Sumatera Barat sebagai sampel penelitian, sementara ini menggunakan Kabupaten Aceh Besar sebagai sampel penelitiannya.
2	Aliyah dan Nahar (2014)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah an Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Jepara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Jepara sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Aceh Besar sebagai sampel penelitiannya.
3	Wahyuni, Sulindawati, Herawati (2014)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Bandung)	Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Bandung sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Aceh Besar sebagai sampel penelitiannya.

Lanjutan Tabel 2.1

no	penulis	judul	Hasil penelitian	persamaan	perbedaan
4	Hahenussa (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Ambon)	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penelitian terdahulu menggunakan Kota Ambon sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Aceh Besar sebagai sampel penelitiannya.
5	Sari (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu.	Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan , penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.	Menggunakan variabel yang sama, yaitu sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, gaya kepemimpinan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Aceh Besar sebagai sampel penelitiannya.
6	Siahaan (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Di Kabupaten Keerom.	Hasil penelitian menunjukkan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan , komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan .	Menggunakan variabel yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, komitmen pimpinan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Keerom sebagai sampel penelitian, sementara penelitian ini menggunakan Kabupaten Aceh Besar sebagai sampel penelitiannya.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan X_1 dengan Y

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, dan sosial politik. Jadi, apabila penyajian laporan keuangan daerah disusun secara sistematis maka laporan keuangan daerah tersebut mempengaruhi transparansi keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan daerah tidak disusun secara sistematis maka laporan keuangan daerah tersebut tidak mempengaruhi transparansi keuangan daerah.

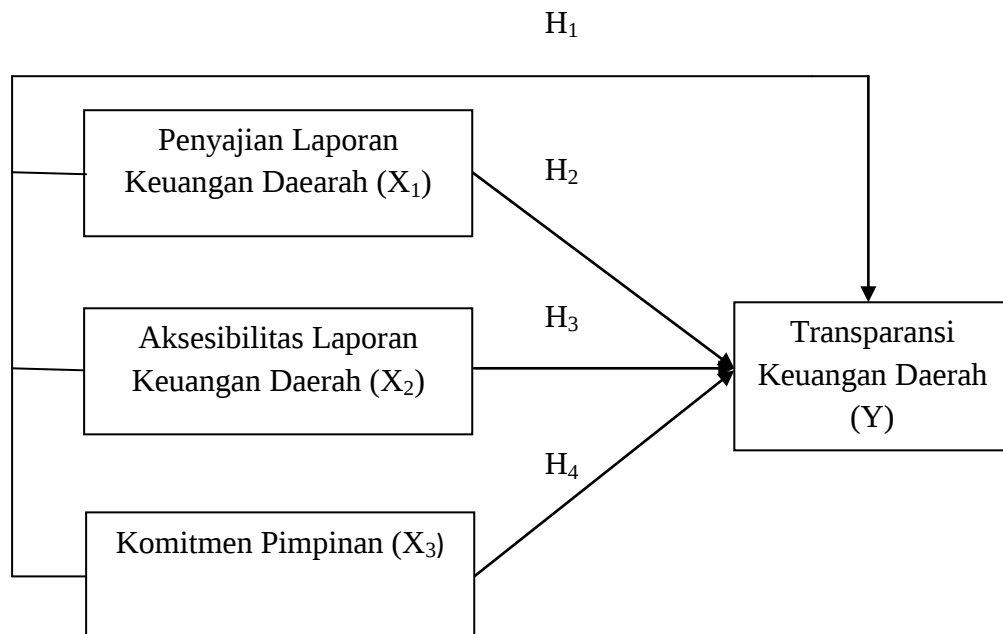
2.3.2 Hubungan X_2 dengan Y

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Jadi semakin mudah laporan keuangan tersebut di akses maka semakin mempengaruhi transparansi laporan keuangan tersebut, sebaliknya jika suatu laporan keuangan tidak bisa di akses maka transparansi keuangan tersebut tidak berpengaruh.

2.3.3 Hubungan X_3 dengan Y

Komitmen pimpinan merupakan kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Jadi apabila suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan. Sebaliknya jika suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik maka tidak berpengaruh pada transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

H₁ : Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

H₂ : Penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

H₃: Aksesibilitas keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

H₄ : Komitmen pimpinan secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah pada SKPD yang ada di Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Sementara objek penelitian adalah terdiri dari bendaharawan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsir dan meramalkan hasilnya yaitu mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel (Siregar, 2013). Penelitian ini menggunakan angka-angka dengan perhitungan statistik. Penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu serta analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Indriantoro dan Supomo, 2013).

3.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi cross sectional. Studi cross sectional merupakan penelitian yang hanya dilakukan pada

satu periode terhadap berbagai sampel dan populasi. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli Tahun 2020.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2011). Pernyataan masalah dilakukan dapat berfokus pada kelompok bendaharawan pada pemerintah dilingkungan kerja pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah bendaharawan di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi adalah gambaran keseluruhan dari yang akan kita teliti, bukan hanya untuk orang atau manusia, tetapi juga dapat berupa obyek dan benda-benda alam lainnya.

Sampel adalah sekumpulan unit yang merupakan bagian dari populasi (Sugiyono, 2015). Pengambilan sampel membantu mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Desain tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang representatif/mewakili populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah bendaharawan pada seluruh SKPD di kabupaten aceh besar yang berjumlah sebanyak 90 pejabat masing dalam 30 SKPD. Masing-masing SKPD mewakili 3 sampel yang terdiri dari 1 sekretariat, 1

bendaharawan dan 1 kepala subbagian keuangan. Populasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Dinas	Sekretaris	Kabag Keuangan	Bendahara	Sampel
1	SEKRETARIAT				
	Sekretariat Daerah	1	1	1	3
	sekretariat DPRK	1	1	1	3
	Sekretariat Baitul Mal	1	1	1	3
2	DINAS		1		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	3
	Dinas Kesehatan	1	1	1	3
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1	1	1	3
	Dinas Sosial	1	1	1	3
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	1	3
	Dinas Pangan	1	1	1	3
	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	3
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	1	3
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1	1	1	3
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA	1	1	1	3
	Dinas Perhubungan	1	1	1	3
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	3
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1	1	1	3
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	1	1	3
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	3
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	1	3
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	1	1	3
	Dinas Pertanian	1	1	1	3

Lanjutan Tabel 3.1

	Dinas Syariat Islam	1	1	1	3
	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	1	3
	Dinas Pertanahan	1	1	1	3
3	BADAN				
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	3
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	1	3
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	1	1	3
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	3
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	1	3
4	KANTOR				
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	1	1	1	3
	Jumlah				90

3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti (Siregar, 2013). Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data primer biasanya juga diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data.

Sumber data dari penelitian ini adalah dari hasil jawaban responden atas kuesioner yang sudah disebarakan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, komitmen pimpinan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Pertanyaan pada kuesioner penelitian ini menggunakan skala likert seperti pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Skala Likert

No	Pernyataan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

3.4 Definisi Dan Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu :

1. Variabel bebas (*Independent*)

Variabel bebas disebut variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat) (Sugiyono, 2015). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2), dan Komitmen Pimpinan (X_3).

2. Variabel terikat (*dependent*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Transparansi Keuangan Daerah (Y).

Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian ini maka variabel-variabel tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
Variabel Terikat (Dependent)			
Transparansi keuangan daerah (Y)	Transparansi mengandung makna memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Djalil, 2014:388).	1) Adanya kerangka kerja pemeriksaan yang independen dan efektif serta didukung oleh lembaga statistik hukum bagi transparansi yang berupa. 2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran berupa 3) Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki data akurat dan berkualitas. 4) Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran. 5) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.	Interval
Variabel Bebas (Independent)			
Penyajian laporan keuangan daerah (X ₁)	Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Nordian, 2008).	1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat dipahami	Interval
Aksesibilitas laporan keuangan (X ₂)	Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Fauziah, 2017:4).	1) Keterbukaan 2) Kemudahan 3) <i>Accesible</i>	Interval
Komitmen pimpinan (X ₃)	Komitmen pimpinan merupakan aspek penting dalam keberlangsungan sistem manajemen suatu organisasi, komitmen pimpinan dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi dimasa yang akan datang (Noviandini dkk, 2015).	1) Komitmen dimulai dalam hati 2) Komitmen diuji dengan perbuatan 3) Komitmen membuka pintu menuju prestasi	Interval

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda melalui bantuan perangkat SPSS versi 20 adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

α = *Intercept/Constant*

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

X_3 = Komitmen Pimpinan

e = *error*

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas

Validasi data bertujuan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014). Pengujian validitas setiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka butir pernyataan tersebut valid.
- 2) Jika r hitung positif dan r hitung $<$ r tabel maka butir pernyataan tersebut tidak valid.

3.6.2 Uji Realibilitas

Sugiyono (2014) menyatakan instrumen yang *reliable* adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan *reliable* atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten. Pengukuran keandalan butir pernyataan dengan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur hasil korelasinya antar skor jawaban pada butir pernyataan yang sama dengan bantuan komputer *Statistikl Program For Siciety Science* (SPSS), kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dikatakan *realible* jika memberikan nilai *cronbach alpha* (α) lebih besar dari pada 0.60 jika nilai yang dihasilkan lebih kecil dari 0,60 maka instrumen dikatakan tidak *reliable*.

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab keempat rumusan masalah dalam penelitian. Hipotesis terdiri dari atas hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruhvariabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan lawan hipotesis nol, yang menyatakan terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif (H_a) yaitu :

Ha₁: Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

Ha₂: Penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

Ha₃: Aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

Ha₄: Komitmen pimpinan secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

Untuk menerima atau menolak keempat hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat berpedoman pada kriteria berikut :

1. Kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama

- a. Jika semua koefisien regresi sama dengan nol (b_1, b_2 dan $b_3 = 0$), maka Ha₁ ditolak. Artinya penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan secara simultan tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.
- b. Jika semua koefisien regresi tidak sama dengan nol (b_1, b_2 dan $b_3 \neq 0$), maka Ha₁ diterima. Artinya penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

2. Kriteria menerima atau menolak hipotesis kedua
 - a. Jika koefisien regresi X_1 sama dengan nol ($b_1 = 0$), maka H_{a2} ditolak.
Artinya penyajian laporan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.
 - b. Jika koefisien regresi X_1 sama dengan nol ($b_1 \neq 0$), maka H_{a2} diterima.
Artinya penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.
3. Kriteria menolak atau menerima hipotesis ketiga
 - a. Jika koefisien regresi X_2 sama dengan nol ($b_2 = 0$), maka H_{a3} ditolak.
Artinya aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.
 - b. Jika koefisien regresi X_2 sama dengan nol ($b_2 \neq 0$), maka H_{a3} diterima.
Artinya aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.
4. Kriteria menerima atau menolak hipotesis keempat
 - a. Jika koefisien regresi X_3 sama dengan nol ($b_3 = 0$), maka H_{a4} ditolak.
Artinya komitmen pimpinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.
 - b. Jika koefisien regresi X_3 sama dengan nol ($b_3 \neq 0$), maka H_{a4} diterima.
Artinya komitmen pimpinan secara parsial berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu pemerintah daerah tingkat II di provinsi Aceh dengan luas wilayah 290.350,73 Ha. Sebagian wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Kabupaten Aceh Besar membentangi dari Selat Malaka di sebelah Utara hingga ke Kabupaten Aceh Jaya di sebelah Selatan. Di sebelah Barat Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh dan membentang hingga ke Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pidie. Aceh Besar membawahi 23 Kecamatan dan 604 Gampong.

Keberadaan Kabupaten Aceh Besar sebagai pintu gerbang utama telah ditunjang sarana transportasi yang cukup memadai seperti Jalan Nasional Arteri Primer Banda Aceh - Medan serta Jalan Kolektor Pimer Banda Aceh - Meulaboh. Disamping itu, ditunjang pula prasarana transportasi Bandar Udara Internasional Iskandar Muda di Blang Bintang, Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya.

Bupati sebagai kepala daerah adalah pemimpin di bidang pemerintahan dalam arti melaksanakan administrasi pemerintahan daerah, membina kehidupan masyarakat disegala bidang, menyelenggarakan keuangan daerah dan menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Untuk mewujudkan tujuan pemerintahan dan pembangunan tersebut maka keberadaan kepala daerah di Kabupaten Aceh Besar dibantu oleh 30 Kantor (Instansi) yang menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Deskriptif Variabel Penelitian

4.2.1 Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Variabel penelitian penyajian laporan keuangan daerah dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Indikator Penyajian Laporan Keuangan Daerah

No	Pertanyaan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Kurang setuju	setuju	Sangat setuju	Mean
1	Laporan keuangan disajikan SKPD secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini	0	0	0	48	42	4,46
2	informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan	0	0	0	68	22	4,26
3	informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	0	0	5	68	17	4,13
4	informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna	0	0	9	50	31	4,24
	Rerata						4,26

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menjelaskan penyajian laporan keuangan daerah pada SKPD Aceh Besar sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 4,26 unit skala likert. Nilai tersebut melebihi 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebagian besar dari jumlah pejabat yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang penyajian laporan keuangan daerah tersebut. Hanya dalam persentase yang kecil dari jumlah responden yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, dan sangat setuju.

Ketepatan waktu penyajian menjadi indikator penyajian laporan keuangan daerah terbaik yang dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan nilai jawaban 4,46 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya. Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari pejabat yang terdata menjawab setuju jika laporan keuangan yang disajikan SKPD secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.

Sementara perbandingan laporan pada informasi masih menjadi indikator penyajian laporan keuangan daerah dengan nilai jawaban terendah yaitu 4,13 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya yang artinya sebahagian besar dari jumlah pejabat yang terdata menjawab kurang setuju jika informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4.2.2 Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

variabel penelitian aksesibilitas laporan keuangan dalam penelitian dapat dijelaskan pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Mean
1	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa	1	5	45	36	3	3,38
2	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah	0	1	4	71	14	4,08
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (<i>website</i>)	1	1	24	55	9	3,77
	Rerata						3,74

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menjelaskan aksesibilitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Besar sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,74 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang aksesibilitas laporan keuangan tersebut. Hanya dalam persentase yang kecil dari jumlah responden yang memilih alternatif pilihan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, dan sangat setuju.

Kemudahan informasi menjadi indikator aksesibilitas laporan keuangan terbaik yang dilakukan di pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dengan nilai jawaban 4,08 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat yang terdata menjawab setuju jika memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Sementara pemuublikasian pada laporan keuangan masih menjadi indikator aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan nilai jawaban terendah yaitu 3,38 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju) yang artinya sebahagian besar dari jumlah pejabat yang terdata menjawab kurang setuju jika hasil laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.

4.2.3 Variabel Komitmen Pimpinan

Variabel penelitian komitmen pimpinan dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Indikator komitmen pimpinan

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Mean
1	Saya dapat memenuhi norma-norma sosial dalam melaksanakan pekerjaan	0	0	0	62	28	4,31
2	Saya dapat bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja	0	0	0	33	57	4,63
3	Saya memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan rekan kerja	0	0	0	47	43	4,47
	Rerata						4,47

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menjelaskan komitmen pimpinan pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 4,47 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang komitmen pimpinan pada pemerintahan tersebut tersebut.

Kebersamaan yang baik menjadi indikator terbaik dalam komitmen pimpinan yang dilakukan pada Pemerintahan Aceh Besar dengan nilai jawaban 4,63 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 5 (skor untuk pilihan jawaban sangat setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat yang terdata menjawab sangat setuju jika pimpinan dapat bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja.

Sementara itu menjalankan norma-norma menjadi indikator komitmen pimpinan dengan nilai jawaban terendah yaitu 4,31 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari indikator lainnya.

4.2.4 Variabel Transparansi Keuangan Daerah

Variabel penelitian transparansi keuangan daerah dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Indikator Transparansi Keuangan Daerah

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Mean
1	APBD disusun dengan pendapatan daerah	0	0	11	58	21	4,11
2	Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas	0	0	6	55	29	4,25
3	Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan ke BPK	0	0	0	33	57	4,63
4	Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan	0	0	0	44	46	4,51
5	Terdapat sistem untuk menyampaikan kritik dan saran	0	0	0	44	46	4,10
	Rerata						4,32

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menjelaskan transparansi keuangan daerah di Kabupaten Aceh Besar sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 4.32 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang transparansi keuangan daerah tersebut. Hanya dalam persentase yang kecil dari jumlah responden yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju dan sangat setuju.

Peninjauan kembali data menjadi indikator transparansi keuangan daerah terbaik yang dilakukan di pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dengan nilai jawaban 4,63 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendakati 4 (untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat yang terdata menjawab setuju jika laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan ke BPK. Walaupun ada sebahagian memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, setuju dan sangat setuju.

Komponen atau elemen informasi menjadi indikator transparansi keuangan daerah terendah dengan nilai 4,10 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Pengujian Instrumen

a. Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product Moment Coeffisient of Correlation* dengan bantuan program SPSS versi 20. Berdasarkan *output* komputer (lampiran *output* SPSS) seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikan dibawah 5%. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan yang dibandingkan dengan dengan nilai kritis korelasi *product moment* (0,207), di mana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai korelasi di atas nilai kritis 5% yaitu di atas 0,207 (lihat tabel Nilai Kritis Korelasi r *Product Moment* untuk n 90

= 0,207 pada lampiran output SPSS), sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konstruk. Ini berarti bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan	Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Item 1	X1	0,535	0,207	Valid
Item 2		0,822	0,207	Valid
Item 3		0,803	0,207	Valid
Item 4		0,819	0,207	Valid
Item 1	X2	0,830	0,207	Valid
Item 2		0,779	0,207	Valid
Item 3		0,838	0,207	Valid
Item 1	X3	0,711	0,207	Valid
Item 2		0,897	0,207	Valid
Item 3		0,787	0,207	Valid
Item 1	Y	0,772	0,207	Valid
Item 2		0,670	0,207	Valid
Item 3		0,727	0,207	Valid
Item 4		0,827	0,207	Valid
Item 5		0,242	0,207	Valid

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid, sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan ke penelitian yang lebih mendalam, karena diperoleh nilai validitas lebih besar dari nilai kritis *product moment* sebesar 0,207 pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, sehingga instrumen data tersebut layak untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

b. Hasil Pengujian Realibilitas

Penggunaan item-item pertanyaan untuk data penelitian yang akan digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini mensyaratkan adanya suatu pengujian konsistensi melalui uji realibilitas (kehandalan), sehingga data yang digunakan untuk analisis benar-benar dapat dipercaya. Uji kehandalan item pertanyaan pada kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji realibilitas internal dari nilai alpha. Uji ini hanya dilakukan satu kali pada sekelompok responden pada masing-masing variabel. Ukuran realibilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,60. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
1	Penyajian laporan keuangan daerah (X1)	0,723	0,60	Realible
2	Aksesibilitas laporan keuangan (X2)	0,738	0,60	Realibel
3	Komitmen pimpinan (X3)	0,717	0,60	Realibel
4	Transparansi laporan keuangan (Y)	0,659	0,60	Realibel

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Uji realibilitas terhadap 4 (empat) atribut pertanyaan yang terlibat dalam masing-masing variabel penyajian laporan keuangan daerah (X₁), aksesibilitas laporan keuangan (X₂), komitmen pimpinan (X₃) dan transparansi keuangan daerah (Y) yang diperoleh nilai alpha masing-masing sebesar 0,723, 0,738, 0,717 dan 0,659. Dengan demikian alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini telah memenuhi kredibilitas *cronbach,s alpha* dengan nilai alpha 0,60.

4.3.2 Pengujian Hipotesis

Untuk melihat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar, menggunakan regresi linear berganda seperti pada tabel 4.7.

Tabel 4.7

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,981	,519		1,889
	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	,393	,081	,432	4,878
	AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN	,098	,060	,146	1,634
	KOMITMEN PIMPINAN	,289	,079	,324	3,651

a. Dependent Variable: TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH

Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS seperti terlihat pada tabel 4.7, maka diperoleh persamaan regresi untuk penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar. Persamaannya dapat kita lihat sebagai berikut :

$$Y = 0,981 + 0,393X_1 + 0,098X_2 + 0,289X_3 + e$$

1. Dalam penelitian ini nilai konstanta adalah sebesar 0,981 artinya jika penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan dianggap konstan, maka transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 0,981.
2. Koefisien regresi penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0,393, artinya setiap 100% perubahan dalam variabel penyajian laporan keuangan daerah

secara relative akan meningkatkan transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,393 atau 39,3%.

3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,098, artinya setiap 100% perubahan dalam variabel aksesibilitas laporan keuangan secara relative akan meningkatkan transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,098 atau 9,8%.
4. Koefisien regresi variabel komitmen pimpinan sebesar 0,289, artinya setiap 100% perubahan dalam variabel komitmen pimpinan secara relative akan meningkatkan transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,289 atau 28,9%.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Hasil pengolahan data juga menunjukkan hubungan antara variabel predictor dengan kriteriumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi/koefisien determinasi yang dihasilkan oleh sebuah persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,575 ^a	,331	,307	,287

a. Predictors: (Constant), KOMITMEN PIMPINAN, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan output SPSS diatas maka dapat diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian ini sebesar 0,575, dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 57,5%.

Artinya penyajian laporan keuangan daerah (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2) dan komitmen pimpinan (X_3) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.

Sementara itu koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,331 artinya sebesar 33,1% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (transparansi laporan keuangan daerah) selebihnya sebesar 66,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah

Pengujian secara simultan ini dilakukan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di kabupaten aceh besar.

Dalam hal analisis koefisien determinasi diperoleh sebesar *R square* 0,331 atau sebesar 33,1%, sehingga dapat dikatakan bahwa 33,1% transparansi keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah sebesar 33,1% sisanya 66,9% dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor - faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.4.2 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah dengan koefisien regresi $\beta_1 = 0,393$, menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi keuangan daerah tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$).

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah apabila $\beta_1 \neq 0$ mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian menolak H_0 (hipotesis nol) atau menerima H_a (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.

4.4.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah dengan koefisien regresi $\beta_2 = 0,098$ menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$).

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah apabila $\beta_2 \neq 0$ mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian

menolak H_0 (hipotesis nol) atau menerima H_a (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.

4.4.4 Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah dengan koefisien regresi $\beta_3 = 0,289$ menunjukkan bahwa komitmen pimpinan terhadap transparansi keuangan daerah tidak sama dengan nol ($\beta_3 \neq 0$).

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah apabila $\beta_3 \neq 0$ mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian menolak H_0 (hipotesis nol) atau menerima H_a (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.
2. Penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.
3. Aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.
4. Komitmen pimpinan secara parsial berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi instansi, pemerintah daerah adalah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan dan sebaiknya penyediaan ruang akses laporan keuangan bisa di tingkatkan lagi terutama di *website* atau internet dikarenakan perkembangan teknologi semakin maju dan internet merupakan salah satu sarana yang mungkin diakses publik. Hal tersebut dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman atau asimetri informasi antara pemerintah selaku pihak manajerial dengan publik.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi metode *survey* dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang ada dan memperluas cakupan responden agar penelitian dapat mewakili fenomena yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Septin, Puji. 2015. *Modul Praktikum Statistika*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- De Araujo, Joaquim Filipe Ferraz Esteves dan F. Tejedo-Romero. 2016. *Local Goverment Transparency Index: Determinats Of Municipalaties Rangking*s. International Journal Of Public Sector Management, Vol.29, No.4.
- Djalil, Rijal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Medan: Salemba Empat.
- Fauziyah, Miftahul Reza. 2017. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(6): 1-16.
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hahenussa, Salomi J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. 2nd Conference In Bussiness, Accounting And Management (CBAM), 2(1):82-89.
- Halim, Abdul. 2014. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM.
- Kartono, Kartini. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Krina, Loina Lalolo P. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta. UPP STIM YKPN. 2010.
<http://lib.mdp.ac.id/perpus/detail/6000353.html>.
- Mahsun, Mohammad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Trasparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei 2006 Hal 1-17.
- Mardiasmo, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mowday, R. T., R.M. Steers dan I.W. Porter, *The Measurement Of Organizational Commitment*, Journal Of Applied Psychology, 84, P. 408-414. 1979.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. Accounting Analysis Jurnal, 1(1): 1-6.
- Nadham, Viswa. 2016. *Assessment Of Enhancing Transparency Of Financial Statements*. International Journal Of Accounting And Financial Reporting, Vol.6, No.2.
- Ni Made Suratmi, dkk. 2014. *Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik*. Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Volume 2 No. 1 Tahun 2014. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noviandini, dkk. 2015. *Analisa Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Keamanan Kerja (SMK3) di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk*. Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sande, peggy. 2013. *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Studi pada pemerintah provinsi sumatera barat*. Jurnal akuntansi, 1(1):1-20.

Sanjaya, I Dewa Nyoman Krisna Putra, Edy Sujana Dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi, 2(1):1-12.

Sekaran, Uma. 2011. *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.

Siregar, Sofyan. 2013. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. PT Bumi Aksara: Jakarta.

Siti Aliyah dan Aida Nahar, 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Jurnal. STIE Nadhlatul Ulama Jepara.

Sugiyono. 2013. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Alfabeta: Bandung.

Sumiyati. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir)*. Jom Fekom, 2(2):1-15.

Superdi, 2017. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Siunjung)*. JOM Fekom, 4(1): 2016-2029.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Wahyuni, Putu Sri., Ni Luh Gede Erni Sulindawati., Dkk. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1):1-11.

Lampiran

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DI KABUPATEN ACEH BESAR

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini sebagai bahan masukan dan kelengkapan data. Adapun maksud dan tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk pelaksanaan penelitian **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar”**.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Peneliti menjamin kerahasiaan semua informasi yang telah diberikan. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2020

Hormat saya,

Nur Alfi Rahmi

NPM: 1802110008

Lampiran

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : (Boleh Tidak Diisi)

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir* : ☐ SMA/SMK ☐ S-1 ☐ S-3
☐ D-3 ☐ S-2

*Berikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia

Petunjuk pengisian kuesioner :

1. Sebelum menjawab setiap pertanyaan/ Pernyataan, mohon dibaca terlebih dahulu dengan baik dan benar.
2. Isilah kuesioner sesuai dengan kondisi instansi tempat Bapak/ Ibu bekerja.
3. Pilihlah salah satu jawaban atau pendapat yang menurut Bapak/ Ibu paling sesuai dengan memberi tanda centang (✓) pada pilihan yang telah disediakan.
4. Keterangan alternatif jawaban dan skor :
 - a. STS = sangat tidak setuju (1)
 - b. TS = Tidak setuju (2)
 - c. KS = Kurang Setuju (3)
 - d. S = Setuju (4)
 - e. SS = Sangat Setuju (5)

Lampiran

VARIABEL PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH (X1)						
No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Laporan keuangan disajikan SKPD secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.					
2	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
3	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
4	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.					

VARIABEL AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN (X2)						
No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.					
2	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.					
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (<i>website</i>)					

VARIABEL KOMITMEN PIMPINAN (X3)						
No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya dapat memenuhi norma-norma sosial dalam melaksanakan pekerjaan.					
2	Saya dapat bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja.					
3	Saya memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan rekan kerja.					

Lampiran

VARIABEL TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH (Y)						
No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	APBD disusun dengan pendapatan kinerja					
2	Pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas.					
3	Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan ke BPK					
4	Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.					
5	Terdapat sistem untuk menyampaikan kritik dan saran.					

Lampiran

Hasil Out-put SPSS

❖ Frequency Table

X11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
setuju	48	53,3	53,3	53,3
Valid sangat setuju	42	46,7	46,7	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
setuju	68	75,6	75,6	75,6
Valid sangat setuju	22	24,4	24,4	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
kurang setuju	5	5,6	5,6	5,6
Valid setuju	68	75,6	75,6	81,1
sangat setuju	17	18,9	18,9	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
kurang setuju	9	10,0	10,0	10,0
Valid setuju	50	55,6	55,6	65,6
sangat setuju	31	34,4	34,4	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
sangat tidak setuju	1	1,1	1,1	1,1
tidak setuju	5	5,6	5,6	6,7
kurang setuju	45	50,0	50,0	56,7
setuju	36	40,0	40,0	96,7
sangat setuju	3	3,3	3,3	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tidak setuju	1	1,1	1,1	1,1
kurang setuju	4	4,4	4,4	5,6
setuju	71	78,9	78,9	84,4
sangat setuju	14	15,6	15,6	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
sangat tidak setuju	1	1,1	1,1	1,1
tidak setuju	1	1,1	1,1	2,2
kurang setuju	24	26,7	26,7	28,9
setuju	55	61,1	61,1	90,0
sangat setuju	9	10,0	10,0	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
setuju	62	68,9	68,9	68,9
sangat setuju	28	31,1	31,1	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X32

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	33	36,7	36,7	36,7
sangat setuju	57	63,3	63,3	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X33

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	47	52,2	52,2	52,2
sangat setuju	43	47,8	47,8	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X41

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	11	12,2	12,2	12,2
setuju	58	64,4	64,4	76,7
sangat setuju	21	23,3	23,3	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X42

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	6	6,7	6,7	6,7
setuju	55	61,1	61,1	67,8
sangat setuju	29	32,2	32,2	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X43

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	33	36,7	36,7	36,7
sangat setuju	57	63,3	63,3	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X44

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
setuju	44	48,9	48,9	48,9
Valid sangat setuju	46	51,1	51,1	100,0
Total	90	100,0	100,0	

X45

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
kurang setuju	7	7,8	7,8	7,8
Valid setuju	67	74,4	74,4	82,2
sangat setuju	16	17,8	17,8	100,0
Total	90	100,0	100,0	

❖ Mean**Statistics**

		X11	X12	X13	X14
N	Valid	90	90	90	90
	Missing	0	0	0	0
Mean		4,4667	4,2444	4,1333	4,2444

Statistics

		X21	X22	X23
N	Valid	90	90	90
	Missing	0	0	0
Mean		3,3889	4,0889	3,7778

Statistics

		X31	X32	X33
N	Valid	90	90	90
	Missing	0	0	0
Mean		4,3111	4,6333	4,4778

Statistics

		X41	X42	X43	X44	X45
N	Valid	90	90	90	90	90
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4,1111	4,2556	4,6333	4,5111	4,1000

❖ **Correlations (X1)**

		X11	X12	X13	X14	X1
X11	Pearson Correlation	1	,297**	,253*	,098	,535**
	Sig. (2-tailed)		,004	,016	,357	,000
	N	90	90	90	90	90
X12	Pearson Correlation	,297**	1	,547**	,651**	,822**
	Sig. (2-tailed)	,004		,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90
X13	Pearson Correlation	,253*	,547**	1	,605**	,803**
	Sig. (2-tailed)	,016	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90	90
X14	Pearson Correlation	,098	,651**	,605**	1	,819**
	Sig. (2-tailed)	,357	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90	90
X1	Pearson Correlation	,535**	,822**	,803**	,819**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations (X2)

		X21	X22	X23	X2
X21	Pearson Correlation	1	,490**	,489**	,830**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	90	90	90	90
X22	Pearson Correlation	,490**	1	,530**	,779**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90
X23	Pearson Correlation	,489**	,530**	1	,838**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90
X2	Pearson Correlation	,830**	,779**	,838**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations (X3)

		X31	X32	X33	X3
X31	Pearson Correlation	1	,511**	,222*	,711**
	Sig. (2-tailed)		,000	,035	,000
	N	90	90	90	90
X32	Pearson Correlation	,511**	1	,635**	,897**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90
X33	Pearson Correlation	,222*	,635**	1	,787**
	Sig. (2-tailed)	,035	,000		,000
	N	90	90	90	90
X3	Pearson Correlation	,711**	,897**	,787**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations (Y)

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y
Y1	Pearson Correlation	1	,482**	,341**	,565**	,038	,772**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000	,720	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Y2	Pearson Correlation	,482**	1	,342**	,400**	-,130	,670**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,222	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Y3	Pearson Correlation	,341**	,342**	1	,778**	-,033	,727**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001		,000	,761	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Y4	Pearson Correlation	,565**	,400**	,778**	1	-,027	,827**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,801	,000
	N	90	90	90	90	90	90
Y5	Pearson Correlation	,038	-,130	-,033	-,027	1	,242*
	Sig. (2-tailed)	,720	,222	,761	,801		,022
	N	90	90	90	90	90	90
Y	Pearson Correlation	,772**	,670**	,727**	,827**	,242*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,022	
	N	90	90	90	90	90	90

Reliability (X1)**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	90	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	90	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,723	4

Reliability (X2)**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	90	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	90	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,738	3

Reliability (X3)**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	90	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	90	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,717	3

Reliability (Y)**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	90	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	90	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,659	5

❖ Regression**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,575 ^a	,331	,307	,287

a. Predictors: (Constant), Komitmen Pimpinan, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,512	3	1,171	14,171	,000 ^b
	Residual	7,104	86	,083		
	Total	10,616	89			

A. Dependent Variable: Transparansi Keuangan Daerah

B. Predictors: (Constant), Komitmen Pimpinan, Penyajian Laporan keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,981	,519		1,889	,062
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	,393	,081	,432	4,878	,000
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,098	,060	,146	1,634	,106
	Komitmen Pimpinan	,289	,079	,324	3,651	,000

a. Dependent Variable: Transparansi Keuangan Daerah

